



**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA PANJA RUU TENTANG KEPARIWISATAAN**  
**KOMISI X DPR RI**  
**KE POLITEKNIK PARIWISATA BALI**  
**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023—2024**  
**TANGGAL 28 S.D. 30 JUNI 2024**

---

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali, untuk menyerap aspirasi publik dari para akademisi, pemda, pelaku dan organisasi pariwisata serta pemangku kepentingan pariwisata lainnya dalam rangka mendapatkan informasi atau data mengenai ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta menyempurnakan materi muatan pengaturan RUU tentang Kepariwisata, khususnya terkait dengan riset, pendidikan dan SDM Kepariwisata.

Kunjungan kerja dipimpin oleh Dr. Dede Yusuf ME, ST., M.IPol selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, dengan anggota perwakilan dari masing-masing fraksi dan diterima langsung oleh Direktur Poltekpar Bali Dr. Ida Bagus Putu Puja. Pertemuan dihadiri oleh akademisi serta pemangku kepariwisataan di Bali, antara lain perwakilan dari PHRI, ASITA, GIPI, HPI, Generasi Pesona Indonesia GenPI, PUTRI, dan para dosen Poltekpar Bali. Kunjungan ini, juga dihadiri pejabat dari Kemenparekraf/Baparekraf RI, yaitu Selliane Helia Ishak, S.Kom., M.Si, selaku sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Strategis, dan Dr. I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, A.Par., MPar, selaku Kepala Biro Komunikasi.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menyampaikan perlunya peningkatan peranan masyarakat lokal, pengaturan keamanan dan kenyamanan wisatawan, promosi berbasis budaya dan tradisi lokal, partisipasi sektor swasta, dan transparansi serta akuntabilitas dana pariwisata. Adapun Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali menyampaikan agar dalam perijinan kepariwisataan melalui OSS, sektor kepariwisataan masuk dalam kategori beresiko tinggi dan bukan yang beresiko rendah. Selain itu, perlu ditekankan juga agar adanya standar yang jelas mengenai pembentukan desa wisata, jangan sampai menjadi komoditas politik. Sementara Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali menyampaikan agar sertifikasi bagi pramuwisata dilakukan dengan baik dan tidak sekadar proses semata yang tidak memberikan manfaat bagi kompetensi para pramuwisata.

Berbagai pandangan dan masukan akan menjadi bahan Panja untuk menyempurnakan draf RUU tentang Kepariwisata dalam proses pembahasan yang akan datang bersama pemerintah.

**Bali, 29 Juni 2024**

Tim Kunker Panja RUU tentang Kepariwisata Komisi X DPR RI ke Poltekpar Bali